

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini pemerintah dituntut untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good government governance* yaitu pemerintah yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini didukung dengan adanya otonomi daerah Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan yang didukung dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Intinya pada era reformasi dan demokratisasi, kesadaran masyarakat untuk menuntut agar keuangan negara dikelola secara akuntabel dan transparan.

Laporan keuangan pemerintah disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah (Indra Bastian, 2010:336). Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Salah satu indikator untuk mengetahui kejujuran dan kinerja pemerintah daerah adalah melalui laporan keuangannya.

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Bastian, 2010:9). Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintahan daerah di beberapa kabupaten/kota di Indonesia sampai tahun 2014 ternyata masih belum ada perbaikan dibandingkan tahun 2013, sehingga hasil penilaian oleh BPK masih tetap memberikan Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) untuk beberapa daerah misalnya yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Untuk LKPD TA 2014 ada sembilan pemda di Jawa Barat yaitu Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Purwakarta yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang pengecualiannya sebagian besar pada aset tetap.

BPK dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2014 masih menemukan beberapa permasalahan yang cukup signifikan dan cenderung berulang, baik yang mempengaruhi penyajian maupun tidak mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam LKPD TA 2014

di hampir seluruh pemda pertama, yaitu tentang penatausahaan aset tetap yang belum tertib di antaranya tanah pemda yang belum bersertifikat dan bahkan tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Kedua adalah pertanggungjawaban penggunaan belanja daerah tidak didukung dengan bukti yang sah dan sesuai dengan pengeluaran riil. Permasalahan ketiga yaitu tentang penatausahaan piutang PBB belum didasarkan pada data yang valid. Keempat, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penyediaan dana kapitasi tersebut. Khususnya yang diterima Pemda dari BPJS Kesehatan pada periode Januari s.d. April 2014 atau sebelum terbitnya Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi. (Antarajawabarat.com,2015)

Kasus lainnya yang terjadi pada LKPD Kabupaten Bandung yang mendapatkan status *disclaimer* dari BPK merupakan sebuah kemunduran karena dari dulu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (Pikiranrakyat.com, 2014). Tentu saja dalam hal ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum mampu memberikan kepuasan atau keyakinan terhadap masyarakat (BPK RI, 2015).

Kesalahan yang ditemukan tim BPK untuk kasus Kabupaten Bandung adalah pencatatan transaksi yang tidak akurat atau bahkan transaksi yang tidak dicatat, aset tetap yang belum diinventarisasi hingga pencatatan persediaan yang tidak tertib. Hal ini tentu akan menyulitkan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang andal. Menurut sekretaris daerah Kabupaten Bandung kelemahan Pemerintah Kabupaten Bandung karena pengelolaan aset daerah yang banyak tidak tercatat

(balebandung.com, 2015). Banyaknya aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Bandung, membuat pengelolaannya sulit dilakukan (balebandung.com, 2015). Ditambah tidak diiringi kompetensi manajemen yang baik (balebandung.com, 2015). Persoalan berat yakni manajemen aset karena aset Pemerintah Kabupaten Bandung senilai Rp 67 triliun tidak diuraikan dengan jelas (Pikiranrakyat.com, 2014).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat menjadi indikasi bahwa nilai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih kurang relevan, kurang andal dan kurang tepat waktu. Mengingat keterandalan dan ketepatanwaktuan informasi laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.

Hal pertama yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah adalah kualitas sumber daya manusia. Menurut Wahyono (2010:12) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (keterandalan), disini menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan dan sumberdaya yang menghasilkannya. Sumberdaya manusia yang pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan di bidang akuntansi. Di sini kemampuan sumberdaya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan dan ketepatanwaktuan).

Saat ini secara bertahap pemerintah berpindah meninggalkan sistem akuntansi *single entry* menjadi *double entry* karena penggunaan *single entry* tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Basis akuntansi yang diterapkan pun mengalami perubahan dari basis kas ke basis akrual. Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi, perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi, pilihan akuntansi dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006).

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan

kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Menurut Jugiyanto (2010:41) informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatanwaktuan) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif.

Penelitian mengenai kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan, seperti Arina Roshanti, dkk (2014) kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Wayan Edi Suparman, dkk (2014) hasilnya Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng, Pemanfaatan Teknologi informasi (TI) berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Penelitian Fadila Ariesta (2013) hasilnya kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan. Pada pengujian kedua didapatkan hasil bahwa kualitas sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan.

Didasari oleh riset yang dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini didasarkan replikasi dari penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan lokasi penelitian pada Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :**“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat
2. Bagaimana pemanfatan teknologi informasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

3. Bagaimana nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat
4. Berapa besar pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat
5. Berapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat
6. Berapa besar pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Mengetahui kualitas Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat
2. Mengetahui pemanfaatan teknologi informasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat
3. Mengetahuinilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat
4. Mengetahui besarnya pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat

5. Mengetahui besarnya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat
6. Mengetahui besarnya pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

- a. Dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah untuk dijadikan referensi serta masukan bagi pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja terutama dalam pencapaian nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Dapat mendorong pemerintah agar lebih menyadari pentingnya penyajian informasi laporan keuangan yang bernilai.
- c. Dapat mendorong masyarakat agar lebih peduli dengan informasi laporan keuangan dari pemerintah, sehingga dapat berpartisipasi dalam mengawasi dan mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah.

1.4.2 Kegunaan Akademis

- a. Dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan data empirik dalam ilmu akuntansi sektor publik terutama dalam bahasan tentang pengelolaan keuangan daerah, dan nilai informasi

laporan keuangan.

- b. Memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan bidang sektor publik khususnya pada akuntansi pemerintahan, yang sampai saat ini masih jarang dijadikan bahan kajian seksama di Indonesia.
- c. Memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang berlokasi di Jalan Raya Padalarang – Cisarua Km. 2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober – Desember 2016.